

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Halim, 2003).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,

merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002 dalam Kuncoro, 2007) :

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Halim 2004 dalam Hamzah (2008) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini menggunakan 4 rasio, yaitu:

- a. Rasio kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Joko, 2007). Hamzah (2008) menyatakan, rasio kemandirian keuangan daerah

atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Seperti yang digunakan dalam penelitian Hamzah (2007) dan Hanika (2010), rasio kemandirian dapat diukur dengan dua cara yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

atau

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kemandirian daerah.

## b. Rasio Efektifitas

Hamzah (2008) menjelaskan bahwa rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Seperti yang digunakan dalam penelitian Hamzah (2007) dan Hanika (2010), rasio efektifitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}$$

Efektifitas juga menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.

Kriteria penilaian efektifitasnya yaitu, apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari

### c. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2004). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Seperti yang digunakan dalam penelitian Hamzah (2007) dan Hanika (2010), rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Pengeluaran} / \text{Realisasi Penerimaan}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan kurang dari 60% adalah sangat efisien.

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut (Budiarto, 2007):

- 1) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 2) Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

#### d. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2004) rasio keserasian yaitu yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. rasio keserasian dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Rasio belanja rutin: menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin.
- 2) Rasio belanja pembangunan: menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan.

Rasio belanja rutin selalu berbanding terbalik dengan rasio belanja pembangunan. semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti dana yang dialokasikan untuk belanja investasi (belanja

pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2004).

## 2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita (Budiono, 1985 dalam Darwanto & Yustikasari, 2007). Dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Pengertian pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan menaikkan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat

pengangguran dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan...

keberhasilan pembangunan ekonomi. suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Penelitian ini yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah adanya kenaikan PDRB dalam suatu daerah.

PDRB sebagai suatu indikator mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Menurut Lilis (2002) dalam Hanika (2010) PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai PDRB yang tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin membaik.

### 3. Pengangguran

Setiap negara mempunyai masalah tentang pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Menurut Putong (2003) pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Pengangguran terbuka menurut ILO (*Internasional Labour Organization*) adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Menurut

mengenai bersedia menerima pekerjaan dalam definisi tersebut tidak dicantumkan karena telah tersirat bahwa seseorang yang sedang mencari pekerjaan adalah orang yang menerima pekerjaan.

Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi  $1\%/2,5\% = 0,4\%$ . Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata.

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kegagalan suatu system masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat.

Menurut BAPENAS kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan didefinisikan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sosial. Kemiskinan dari sisi ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Sedangkan dari sisi sosial yang berarti ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relative tetap maupun yang berkembang. faktor relatif tetap yaitu letak geografis dan daya dukung alam. faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Indikator yang menyebabkan orang terjebak dalam kemiskinan diantaranya yaitu perkembangan dibidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, tempat tinggal, pangan, makanan, jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

## **B. Penelitian Terdahulu, Penurunan Hipotesis dan Model Penelitian**

### **1. Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Tahun Lalu terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun Berjalan.**

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif dan efisiensi, suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hasil penelitian Hamzah (2008) menemukan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanika (2010), yang menemukan bahwa rasio kemandirian, efisiensi, dan keserasian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun rasio efektifitas membuktikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini, secara umum menjelaskan bahwa semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin

tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Adi (2006) menjelaskan bahwa suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada saat mengalami pertumbuhan PAD dan melakukan peningkatan efisiensi sumber daya yang dimiliki. Artinya, semakin efisien dan mandiri suatu daerah dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meskipun angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih terhitung tinggi.

Syafrizal dalam Hamzah (2008), menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing untuk meningkatkan keunggulan komparatif suatu sektor ekonomi disuatu daerah menurut Hamzah (2008) yaitu melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor disuatu daerah terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah referensinya.

Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah (Adi, 2006). Realitas ini mendukung temuan Wong

(2002) dalam Adi (2006) yang menunjukkan adanya kontribusi positif dari

PAD ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri. Selain itu Adi (2006) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih (2003), yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan ini Bappenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, artinya setiap terjadi kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan PAD. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Priyo (2006) juga menjelaskan bahwa peningkatan PAD dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena dengan meningkatnya PAD maka rasio kemandirian juga meningkat.

Menurut Hanika (2010) desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian Nanga (2006) dalam Hanika (2010) mengidentifikasi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

daerah (Halim, 2004). Sehingga, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hamzah (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding dengan target penerimaan PAD, maka dikatakan semakin efektif, dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kemampuan daerah yang baik akan mendorong pertumbuhan daerah.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil angka rasio efisiensi, maka semakin efisien, dan begitu pula sebaliknya (Hamzah, 2008). Rasio efisiensi apabila realisasi belanja yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya efisiensi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kwon dalam Hanika (2010) dalam sebuah studi di Korea menemukan bahwa rasio penerimaan total daerah dan rasio pengeluaran total daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian Hamzah (2008) pada propinsi Jawa Timur yang sejalan dengan penelitian Hanika (2010) pada propinsi DIY menyimpulkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan.

diterima atau adanya efisiensi. Efisiensi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja daerahnya, semakin kecil presentase dana belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya ([www.sleman.go.id](http://www.sleman.go.id)). Penelitian Heriansyah (2005) menyatakan bahwa aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan. Penyaluran dana yang mengutamakan belanja pembangunan tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik.

Penelitian Lin dan Liu dalam Hanika (2010) menyimpulkan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Abdullah dalam Fitriyani (2009) meneliti peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia, menemukan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran rutin juga berpengaruh positif namun sangat kecil.

Penelitian Hamzah (2008), Hanika (2010), Halim (2006), menemukan adanya pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung ditahun yang sama. Penelitian ini melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan *lag* atau pengaruh dari kinerja keuangan tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yang pertama adalah:

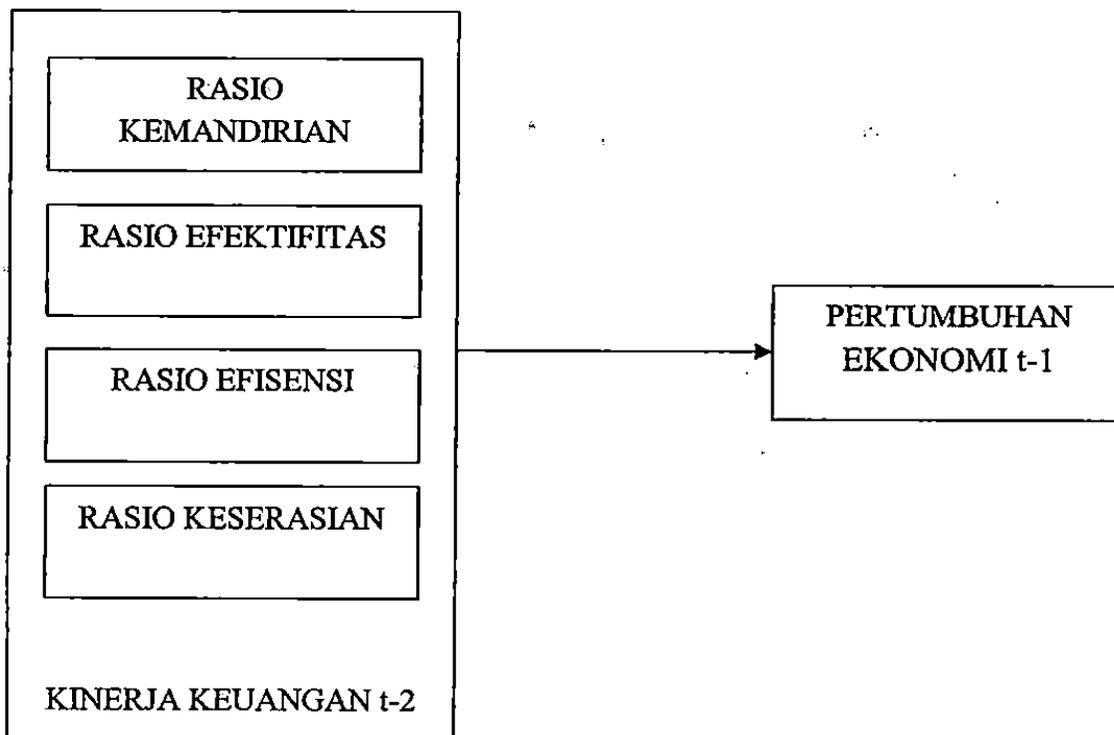
H<sub>1a</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio kemandirian secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>1b</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efektifitas secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>1c</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efisiensi secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>1d</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio keserasian secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Penelitian

## 2. Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi<sub>t-1</sub> Terhadap Pengangguran.

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran

masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipecahkan oleh

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi agar dapat menaikkan standar hidup, tingkat pertumbuhan harus melebihi tingkat kenaikan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang dapat menaikkan standar hidup melebihi tingkat kenaikan penduduk akan menurunkan jumlah pengangguran pada tahun berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya akan selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun dan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Salah satu tujuan pembangunan masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat melalui pertumbuhan ekonomi yaitu pengurangan jumlah pengangguran daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Hamzah (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian Putong dalam Hamzah (2008), menyatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% lebih besar dari nilai trennya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi 1% per

2,5% sama dengan 0,4%. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari nilai trennya, maka tingkat pengangguran akan meningkat.

maka pertumbuhan ekonomi harus dipacu agar dapat tumbuh sebesar 5% di atas rata-rata. Semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran. Hal ini juga dapat diteliti dengan melihat pengaruh dari angka pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap angka pengangguran di tahun berjalan.

Hamzah (2008), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran dengan meneliti pada tahun yang sama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2010). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub> secara langsung berpengaruh terhadap pengangguran.

Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Model Penelitian

### 3. Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi<sub>t-1</sub> terhadap Kemiskinan Tahun Berjalan.

Hanika (2010) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan. Hamzah (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2010). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

stabil akan mendorong berkurangnya angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah seharusnya mampu untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal untuk menumbuhkan perekonomian dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan baik pada daerah perkotaan ataupun pedesaan yaitu kemerosotan yang terjadi pada sektor riil.

Pada penelitian Yulina dalam Hanika (2010) menemukan bahwa krisis ekonomi yang mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan bertambahnya penduduk miskin secara signifikan. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat akibat melambungnya harga bahan pokok dan ketidakadaannya lapangan kerja. Kurangnya lapangan pekerjaan dikarenakan banyaknya investor yang gulung tikar atau rumitnya mengurus perizinan dalam membuka usaha di daerah.

Berita statistik menunjukkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun, namun tidak di iringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya terhadap angka kemiskinan di tahun berjalan. Seperti yang ditunjukkan pada tahun 1999-2002, peningkatan angka kemiskinan mencapai 30,29% yang diakibatkan dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Namun pada tahun 2005-2006 mengalami pergeseran yang cukup signifikan dengan mengalami penurunan hingga 40%. Hal ini dapat terindikasi dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2003-2004 yang mengalami

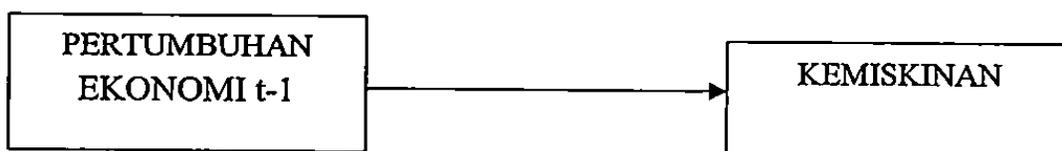
peningkatan sebesar 30,87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya.

Penelitian Hamzah (2007) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitiannya pada tahun 2008, dimana Hamzah menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun lalu berpengaruh terhadap kemiskinan tahun berjalan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2010), dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan ditahun berjalan yang sama tanpa melihat pengaruh dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub> secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Model Penelitian

4. Pengaruh Tidak Langsung Kinerja Keuangan<sub>t-2</sub> terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi<sub>t-1</sub>.

Hanika (2010) menyatakan bahwa indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah salah satunya adalah tingkat pertumbuhan yang

dialami oleh suatu daerah. Apabila suatu daerah mengalami peningkatan

pendapatan, maka daerah tersebut tingkat kemandirian kinerja keuangannya juga akan meningkat serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya secara otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran pada tahun selanjutnya. Fungsi dari pengukuran kinerja keuangan dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan dalam keuangan pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan suatu daerah baik, maka akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran pada tahun berikutnya (Hamzah, 2008).

Sama halnya dengan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, bahwa kemerosotan yang terjadi di sektor riil mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan stabil dapat dilihat dengan menggunakan kinerja keuangan daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah yang baik akan mendorong berkurangnya jumlah pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi (Fitriyanti, 2008).

Pada penelitian Hamzah (2007) menyatakan bahwa pendapatan terhadap pengangguran berpengaruh positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belanja daerah juga berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pada 2008, Hamzah kembali melakukan penelitian dan menemukan bahwa secara tidak langsung antara kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, namun rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini mungkin dikarenakan rasio efektifitas apabila besarnya realisasi dibandingkan dengan RAB lebih rendah dari

penerimaan PAD pada masing-masing daerah, maka daerah tersebut semakin efektif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2010), yang menemukan bahwa Rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio keserasian secara positif, berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Namun tidak berpengaruh pada rasio efektifitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang keempat yaitu:

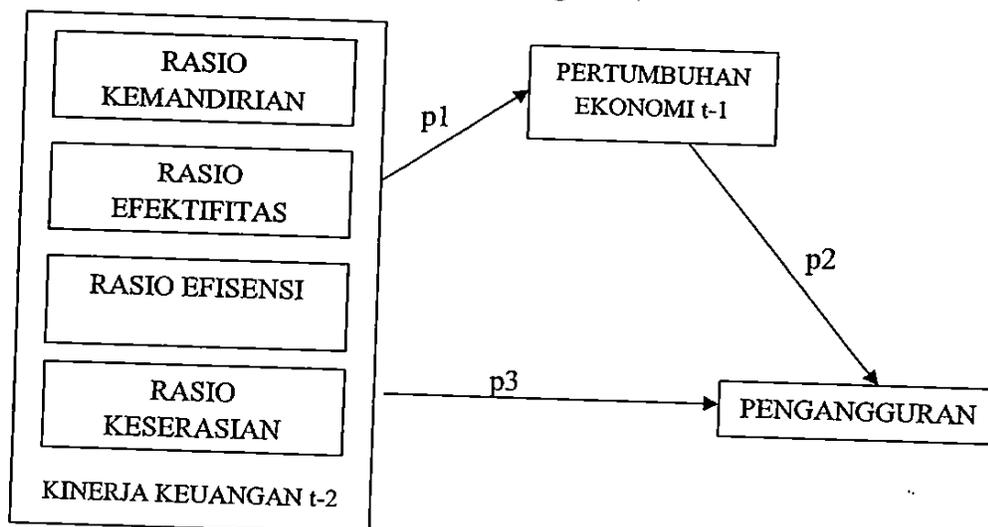
H<sub>4a</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio kemandirian secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>4b</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efektifitas secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>4c</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

H<sub>4d</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio keserasian secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Model Penelitian

5. Pengaruh Tidak Langsung Kinerja Keuangan<sub>t-2</sub> terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi<sub>t-1</sub>.

Kemiskinan merupakan persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Kinerja keuangan suatu daerah yang baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah kemiskinan pada tahun selanjutnya. Hal ini seharusnya dapat dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, dan sebagainya.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan sudah sangatlah banyak, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kemiskinan sejauh ini seharusnya tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri, namun seharusnya dilandasi kemampuan mandiri dari masing-masing negara. Sehingga kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh terhadap kemiskinan, semakin mandiri daerah tersebut tingkat kemiskinan menurun (Widyastuti, 2001 dalam Soeratno 2004).

Penelitian Hamzah (2007), meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, dan hasilnya menyimpulkan bahwa belanja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tahun berjalan. Pada penelitian Hamzah berikutnya pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa secara tidak langsung antara

terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, namun rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Rasio efektifitas, apabila besarnya realisasi penerimaan PAD lebih besar dari pada target penerimaan PAD pada masing-masing daerah, maka daerah tersebut semakin efektif. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang kelima yaitu:

- H<sub>5a</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio kemandirian secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.
- H<sub>5b</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efektifitas secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.
- H<sub>5c</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.
- H<sub>5d</sub>: Kinerja keuangan<sub>t-2</sub> berupa rasio keserasian secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi<sub>t-1</sub>.

Model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

